

www.pushamuii.org



2006

January 1 - December 31, 2006

# PUSHAM UII

## ANNUAL REPORT



PUSHAM-UII  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Islam Indonesia



# LAPORAN TAHUNAN **PUSHAM UII**

1 Januari - 31 Desember 2006



www.pushamuii.org



# PUSHAM UII

## ANNUAL REPORT

January 1 - December 31, 2006

# LAPORAN TAHUNAN PUSHAM UII

1 Januari - 31 Desember 2006



# LAPORAN TAHUNAN **PUSHAM UII**

1 Januari - 31 Desember 2006

Maret 2007

## Penyusun

Eko Riyadi  
Imran  
La Ode Arham  
Supriyanto Abdi  
Astri Unun Pratiwi

## Penterjemah

Nova Umiyati  
Supriyanto Abdi

Layout  
Tarkima

Desain Sampul  
Ahmad Irfan Faqih

Foto Dok.  
PUSHAM UII

Jeruklegi RT.13 RW.35 Gg. Bakung  
No. 517 A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
Telp. (0274) 452032 ; Fax. (0274) 452158  
Website: <http://www.pushamuii.org>  
e-mail: pushamuii@yahoo.com

No. 517 A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
Telp. (0274) 452032 ; Fax. (0274) 452158  
Website: <http://www.pushamuii.org>  
e-mail: pushamuii@yahoo.com

PUSHAM UII  
Photograph Collection

Cover Design  
Ahmad Irfan Faqih

Layout  
Tarkima

Translated by  
Supriyanto Abdi  
Nova Umiyati

Prepared by  
Eko Riyadi  
Imran  
La Ode Arham  
Asti Unun Pratiwi  
Supriyanto Abdi

Maret 2007

January 1 - December 31, 2006  
**PUSHAM UII**  
**ANNUAL REPORT**

## Sambutan



Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta memasuki usia ke-6. Pada tahun ke enam ini PUSHAM UII kembali memantapkan kiprahnya pada jalur pengembangan dan pengkajian hak asasi manusia lewat jalur pendidikan dan birokrasi.

Jalur pendidikan menjadi alternatif terbaik guna mewujudkan misi PUSHAM UII dalam rangka diseminasi HAM demi terwujudnya masyarakat yang demokratis. Oleh karenanya, kerjasama antara PUSHAM UII dengan *Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), University of Oslo*, Norwegia yang telah berjalan sejak tahun 2004 masih dilakukan pada tahun 2006 ini khususnya dalam konteks pengembangan pendidikan. Pada tahun ini ada dua agenda besar dalam kerjasama yaitu pelatihan HAM bagi para dosen pengajar HAM dan penerbitan buku bacaan HAM yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa hukum.

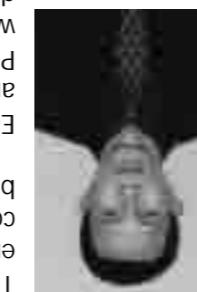
Selain pendidikan bagi mahasiswa hukum, tahun ini PUSHAM UII dipercaya untuk memberikan kuliah tambahan bagi para Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (AKPOL) Semarang bekerjasama dengan The Asia Foundation. Tentunya kegiatan ini sangat membanggakan karena PUSHAM UII bisa "membenamkan" semangat penghormatan terhadap HAM pada taruna yang notabene akan menjadi pejabat kepolisian. Sebuah kerja panjang untuk memutus serangkaian pelanggaran HAM yang seringkali masih dilakukan oleh aparat kepolisian. Program kuliah HAM di AKPOL Semarang ini merupakan rangkaian dari program *Community Oriented Policing (COP)*. PUSHAM UII menfasilitasi program COP di beberapa wilayah yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian wilayah Jawa Tengah dan wilayah Papua. Khusus untuk program COP di Papua dilakukan atas kerjasama antara PUSHAM UII dengan British Petroleum (BP) LNG Tangguh.

Dalam konteks diseminasi HAM melalui jalur birokrasi, PUSHAM UII meletakkan isu HAM Ekosob sebagai isu utama (*the main issue*) yaitu dengan membantu Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) yang telah berdiri pada tahun 2005 dengan serangkaian program penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) yang pada akhirnya bisa mengantarkan LOD DIY menjadi eksis dan terlembaga dengan baik.

Pada tahun ini juga, PUSHAM UII memiliki program monumental yaitu penelitian untuk mengurai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim orde baru terhadap kelompok masyarakat yang dituduh terlibat dalam gerakan Komando Jihad. Sebuah rekayasa politik demi rezim stabilitas di bawah ideologi pembangunan (*developmentalisme*) dan juga sebuah rekayasa yang telah menyebabkan terjadinya pelanggaran berat HAM yaitu kejahanan terhadap kemanusiaan.

Pada akhirnya selaku Direktur mewakili seluruh jajaran pimpinan PUSHAM UII, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran Rektorat Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga lembaga ini bisa eksis dan berkontribusi bagi masyarakat luas. Terimakasih juga saya sampaikan kepada para Direktur Divisi yaitu Bp. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum (Direktur Kerjasama yang sekarang menjadi Ketua Komisi Yudisial RI) dan Eko Prasetyo (Direktur Program), juga kepada seluruh staf (Imran, Eko Riyadi, Supriyanto Abdi, La Ode Arham), juga kepada staf kantor (Unun, Nova, Arwin, Wid, Ima,

## Foreword



In the end, as Director of the Centre, I would like to express my deepest gratitude to the Rector of Islamic University of Indonesia for both moral and material supports that have enabled the Centre to perform its functions. I would like to express my deepest gratitude to the Rector of Islamic University of Indonesia for both moral and material supports that have enabled the Centre to perform its functions. I would like to express my deepest gratitude to the Rector of Islamic University of Indonesia for both moral and material supports that have enabled the Centre to perform its functions.

Thus it could be considered as a crime against humanity. The research found that the Komando Jihad case was a political fraud for stability reason imposed by the New Order's development ideology (*developmentalism*) which caused many human rights gross violations, and conducted by New Order Regime against Muslim activists allegedly involved in Komando Jihad movement. Also in this year, PUSHAM UII has a monumental program, namely a research on human rights violations

finally encouraged Local Ombudsman to become an effective and well-managed institution. Providing assistance to Yogyakarta Local Ombudsman with a series of capacity building programs which

In bureaucratic contexts, PUSHAM UII has taken economic, social and cultural rights as the main issue by finally encouraging Local Ombudsman to become an effective and well-managed institution. In providing assistance to Yogyakarta Local Ombudsman with a series of capacity building programs which thus far have facilitated COP program in several areas, i.e., Yogyakarta Special Province, some of Central Java among police. The training was part of a series of Community Oriented Policing (COP) Program. PUSHAM UII who will become police officers. It required long efforts to break up the chains of human rights violations program as PUSHAM UII was assigned to inculcate human rights concern and awareness to police students Academy students in cooperation with The Asia Foundation. This was definitely an important and challenging task in addition, in 2006 PUSHAM UII was also trusted to provide additional trainings for Semarang Police Areas and Papua. In Papua, COP Program was carried out in cooperation with British Petroleum (BP) LNG Areas and Papua. In Papua, COP Program was carried out in cooperation with British Petroleum (BP) LNG thus far have facilitated COP program in several areas, i.e., Yogyakarta Special Province, some of Central Java among police. The training was part of a series of Community Oriented Policing (COP) Program. PUSHAM UII who will become police officers. It required long efforts to break up the chains of human rights violations program as PUSHAM UII was assigned to inculcate human rights concern and awareness to police students Academy students in cooperation with The Asia Foundation. This was definitely an important and challenging task in addition, in 2006 PUSHAM UII was also trusted to provide additional trainings for Semarang Police Areas and Papua. In Papua, COP Program was carried out in cooperation with British Petroleum (BP) LNG

In addition, in 2006 PUSHAM UII was chosen as the best means to enliven PUSHAM UII's mission in disseminating human rights textbook and supplementary for law students.

Institution were (1) human rights training for human rights and law lecturers and (2) the preparation of development context. In 2006, two main agendas of PUSHAM UII's cooperation with this institution has been in place since 2004 was continued in 2006, particularly in education which has been in the field of human rights for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway, PUSHAM UII and Norwegian Center for Human Rights (NCHR), University of Oslo, Norway, and promoting human rights and democratic society. Therefore, cooperation between Education was chosen as the best means to enliven PUSHAM UII's mission in disseminating human rights textbook and supplementary for law students.

The Centre for Human Rights Studies of Islamic University of Indonesia (PUSHAM UII) has committed its sixth year of existence. As in previous years, in 2006 the Centre has ensured its entered its sixth year of existence. As in previous years, in 2006 the Centre has ensured its commitment in human rights development and studies, especially in education and bureaucracy areas.



Juni, Gandang Susilo, Dwi, Manu, Yatman), juga para relawan (Irfan, Aryo, Mulyadi, Nurdyad, Nana, Rano), sekali lagi terimakasih atas kerja keras tak kenal lelahnya sehingga roda lembaga ini tetap menggelinding tanpa ada rintangan yang berarti.

Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada teman-teman jejaring kerja PUSHAM UII yang telah banyak membantu antara lain teman-teman LBH Yogyakarta di bawah koordinasi Irsyad Tamrin, Rifka Annisa (Tyas dan Roswati), GTB, Ideas, LKY, Forum, dan lain sebagainya. Juga kami ucapkan terimakasih kepada Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation, Partnership for Government Reform in Indonesia, Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, LP UII, ELSAM Jakarta, KOMNAS HAM RI, Dirjen HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kehakiman DIY dan British Petroleum (BP) Indonesia yang telah bekerjasama dengan PUSHAM UII semoga bisa memberikan manfaat lebih baik. Secara khusus saya mengucapkan banyak terimakasih kepada para dewan pakar atas semua sumbangan pemikirannya. Semoga kami bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Suparman Marzuki, S.H., M.Si  
Direktur PUSHAM UII

Suparman Marzuki, S.H., M.Si  
Director of PUSHAM UII

My appreciation also goes to all PUSHAM UII's network and partners: LBH Yogyakarta, Rifka Annisa, GTB, Ideas, LKY, Forum, Yogyakarta Province Local Government, Yogyakarta City Government, UII Research Institute, ELSAM Jakarta, National Commission of Human Rights, Human Rights Directorate General of Indonesia National Justice and Human Rights Department, Yogyakarta Local Department of Justice and Indonesian National Justice and many others. I would also thank to our international partners: Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation, Partnership for Government Reform in Indonesia, Pemeritah Propinsi DIY, Pemeritah Kota Yogyakarta, LP UII, ELSAM Jakarta, KOMNAS HAM RI, Dirjen HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kehakiman DIY and British Petroleum (BP), Indonesia which have been working together with PUSHAM UII. I would like to express my thanks to our international partners: Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway, The Asia Foundation, Partnership for Government Reform in Indonesia, Pemeritah Propinsi DIY, Pemeritah Kota Yogyakarta, LP UII, ELSAM Jakarta, KOMNAS HAM RI, Dirjen HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kehakiman DIY and British Petroleum (BP), Indonesia which have been working together with PUSHAM UII. I would like to express my thoughts and invaluable contribution.

## Tentang PUSHAM UII

### Sejarah

PUSHAM UII secara resmi berdiri pada 20 Maret 2000 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia no 9 tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad Djazman Alkindi disertai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia No 44/B.6/1V/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia yang ditandatangani oleh Prof. Zaini Dahlan, MA.

Surat Keputusan Badan Wakaf dan Rektor Universitas Islam Indonesia itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Universitas Islam Indonesia dengan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 7 April 2000.

Latarbelakang pembentukan PUSHAM adalah kesadaran dan keprihatinan yang mendalam civitas akademika Universitas Islam Indonesia akan kondisi Hak Asasi Manusia yang sangat buruk di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, sejarah Indonesia diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran HAM, penderitaan dan kesengsaraan rakyat serta ketimpangan sosial. Kenyataan inilah yang melahirkan keprihatinan yang mendalam dan motivasi yang kuat di kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk berusaha meningkatkan kondisi HAM di negeri ini. Pada saat yang sama, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang baru dibentuk waktu itu juga mempunyai concern yang sama, dan kesamaan concern untuk mendiseminasi dan mempromosikan HAM inilah yang melahirkan nota kesepahaman tersebut di atas.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) merupakan lembaga studi independen yang mengedepankan pertanggungjawaban ilmiah akademik dan netral dari segala kepentingan apapun. Sifat independen dari PUSHAM UII adalah independen penuh yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk menentukan program, personal pengurus, serta kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Hubungan antara PUSHAM UII dengan birokrasi universitas adalah hubungan koordinatif dan bukan hubungan komando.

### Visi dan Misi

Menjadi pusat kajian Hak Asasi Manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.

Visi di atas akan direalisasikan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan pelatihan praktis HAM bagi masyarakat publik.
2. Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

## About PUSHAM UII

## Daftar Isi

Sambutan .....	i
Tentang Pusham UII .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<b>PROGRAM</b>	
Program Penyusunan Buku Ajar HAM dan Training Hukum HAM bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM	1
A. Penulisan Buku Ajar HAM dan Buku Bunga Rampai HAM .....	1
B. Training Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Pengajar Hukum HAM .....	1
Seminar Tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	2
Focused Group Discussion tentang Urgensi Ratifikasi Statuta Roma .....	3
Rangkaian Program Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum COP (Community Oriented Policing) bagi Akademi Kepolisian Semarang .....	4
Launcing Program COP Papua .....	6
Pendamping Pokja COP .....	7
Workshop Penyusunan Promosi HAM .....	8
Penelitian Kajian Pelanggaran HAM dan Komando Jihad .....	9
Survei Islam dan Isu-Isu Global di Kalangan Pesantren dan Gerakan Islam .....	10
Program Bagian Umum .....	11
Struktur Organisasi .....	12
Laporan Keuangan .....	13
<b>PROGRAM</b>	
Preparation Of Human Rights Textbook And Human Rights Law Training For Human Rights And Law	
Content .....	vi
About Pusham UII .....	iii
Foreword .....	i
Focus Group Discussion On The Urgency To Ratify Rome Statute .....	3
Seminar On A New Penal Code Draft .....	2
Human Rights Law Training for Human Rights and Law Lectures .....	1
Preparation Of Human Rights Textbook And Publicitation Of Human Rights .....	1
Lectures .....	1
A Series Of Program To Develop And Establish A Cop Curriculum In The National Police Academy	
Financial Statement .....	13
Organization Structure .....	12
General Affairs Program .....	11
Survey On Islam And Global Issues In Pesantren And Islamic Movements .....	10
Research On Human Rights Violation In Komando Jihad Case .....	9
Workshop of Human Rights Promotion .....	8
Facilitation Of Cop Taskforces .....	7
Launcing Of COP Program in Papua .....	6
Semarang .....	4

**Content**

## Program



### B. Human Rights Law Training for Human Rights and Law Lecturers

The supplementary book was designed to supplement the anti-cultured human rights textbook for law students, although it was also accessible by anybody concerned with the development of human rights. The supplementary book was also used to supplement the anti-cultured human rights textbook for law students. It took approximately one year to gather all manuscripts from contributing lecturers and in the discourses. Although it was also accessible by anybody concerned with the development of human rights students, although it was also accessible by anybody concerned with the development of human rights. The supplementary book was designed to supplement the anti-cultured human rights textbook for law students. It took approximately one year to gather all manuscripts from contributing lecturers and in the discourses. Although it was also accessible by anybody concerned with the development of human rights students, although it was also accessible by anybody concerned with the development of human rights.

**Program Description**

1. Human Rights, Religion and the Dynamics of Global Politics
2. Human Rights, Democracy and Good Governance
3. Human Rights in Indonesia, State Administration and Legal System
4. Dynamics and Prospect of National Human Rights Enforcement
5. Indigenous People and Vulnerable Groups, Rights
6. Health, Culture and Environmental Rights
7. Human Rights Violation and Human Rights Tribunal
8. Human Rights, Humanitarian Law and Armed Conflicts

There are eight main issues covered in the book, i.e.:  
 The Complexity of Human Rights: Multi-perspective Accounts, was finalized. The book is composed of thirty-three articles written by thirty-four human rights lecturers with different backgrounds from various universities in Indonesia. While the textbook is still in progress, in this year the supplementary book entitled "Exploring chapters of the book was already completed. It is expected that the book will be finalized and published in mid-2007. In 2006, the preparation of human rights textbook, which was initiated in 2005, was continued and most chapters of the book was already completed. It is expected that the book will be finalized and published in mid-2007. While the textbook is still in progress, in this year the supplementary book entitled "Exploring

**Book Preparation of Human Rights Textbook and Publication of Human Rights Supplementary**

### PREPARATION OF HUMAN RIGHTS TEXTBOOK AND HUMAN RIGHTS LAW TRAINING FOR HUMAN RIGHTS AND LAW LECTURERS

## Program

### PROGRAM PENYUSUNAN BUKU AJAR HAM DAN TRAINING HUKUM HAM BAGI DOSEN PENGAJAR HUKUM DAN HAM

#### A. Penulisan Buku Ajar HAM dan Buku Bunga Rampai HAM

Program ini merupakan program lanjutan dari tahun 2005, dan pada tahun ini telah diselesaikan penulisan buku bunga rampai yang kemudian diterbitkan dengan Judul "HAM dan Demokrasi". Buku ini ditulis oleh 33 (tigapuluhan tiga) orang yang kesemuanya merupakan dosen pengajar HAM pada Fakultas Hukum di berbagai universitas se-Indonesia. Buku ini merupakan buku besar yang menampung berbagai kajian yang sangat menarik karena ditulis oleh dosen-dosen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Secara umum ada 8 isu besar yang termuat dalam buku tersebut, yaitu:

1. HAM, Agama dan Dinamika Politik Global
2. HAM, Demokrasi dan Good Governance
3. Kajian Kritis Wacana HAM Nasional
4. Dinamika Penegakan HAM Nasional
5. Hak-hak Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan
6. Hak atas Kesehatan, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup
7. Pelanggaran HAM dan Pengadilan HAM
8. HAM, Hukum Humaniter dan Konflik Bersenjata

#### Deskripsi Kegiatan

Buku ini disusun guna melengkapi kebutuhan bacaan yang akan mendampingi buku ajar HAM bagi mahasiswa fakultas hukum yang sedang disiapkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan buku tersebut dapat diakses oleh semua kalangan yang konsen terhadap pengembangan diskursus HAM. Membutuhkan waktu kira-kira satu tahun untuk dapat mengumpulkan naskah dari dosen-dosen dan pada akhirnya baru Desember 2006 naskah tersebut terkumpul dan kemudian dicetak. Buku tersebut sangat membantu untuk mengembangkan daya analisis masalah berperspektif HAM, karena sebagian besar naskah adalah naskah akademis yang merupakan hasil dari telaah mendalam serta berbagai hasil riset. Sehingga analisis HAM sangat lekat di dalamnya terhadap berbagai isu yang dituliskan.

#### B. Training Hukum HAM bagi Dosen-dosen Pengajar Hukum HAM

Pada tahun 2005, PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia telah melakukan workshop dan training hukum HAM bagi dosen-dosen pengajar hukum HAM se-Indonesia. Pada tahun 2006 program ini dilanjutkan dengan mengadakan training sebanyak 2 (dua) kali dengan mengundang masing-masing training sebanyak 20 (duapuluhan) orang peserta, sehingga pada tahun 2006 peserta training sebanyak 40 (empatpuluhan) orang dosen.



Training ini dilaksanakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre For Human Rights (NCHR), Oslo University, training pertama dilaksanakan pada 23-27 Januari 2006 bertempat di Hotel Yogyakarta Plaza dan yang kedua 3-7 April 2006 bertempat di Hotel Holiday Resort, Lombok.

#### Deskripsi Kegiatan

Training ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan mengundang 20 (duapuluhan) orang peserta. Semua peserta adalah dosen pengajar Hukum HAM pada Fakultas Hukum pada Universitas se-Indonesia. Adapun secara garis besar materi yang disampaikan adalah Pengantar HAM, Hak-Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum HAM Internasional, Hukum HAM Nasional Indonesia, Pengadilan HAM Indonesia, Mekanisme Monitoring HAM, Hukum Humaniter dan Pengadilan HAM Internasional, HAM dan Hukum Administrasi. Materi terakhir adalah materi baru dan juga diskursus HAM baru karena sebelumnya belum pernah ada ahli yang menggali tentang masalah tersebut.

Training ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber Internasional dan Nasional antara lain Njal Hostmaelingen (NCHR), Cristian Ranheim (NCHR), Hans Petter Graver (NCHR), Rudi M. Rizki, S.H., LL.M (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung), Ifdhal Kasim, S.H. (ELSAM), Enny Suprapto, Ph.D (KOMNAS HAM), Fadillah Agus, S.H., M.H. (Tri Sakti dan ICRC), Agung Yudhawiranata, SIP, LL.M (ELSAM) dan Antonio Prajasto (DEMOS).

## SEMINAR TENTANG RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Warisan sejarah pemberlakuan hukum di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah yaitu mencari rumusan hukum yang tepat diberlakukan bagi bangsa Indonesia. Salah satu wujud pekerjaan itu adalah Penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah dilakukan lebih dari 30 tahun. Pasca 1998, perdebatan mengenai pembaharuan KUHP mengemuka seiring dengan terbukanya ruang diskusi dan perdebatan publik. Salah satu bahan perdebatan yang ramai dibicarakan orang adalah keinginan dari tim penyusun yang diketuai oleh Prof. Muladi, S.H. untuk memasukkan pasal-pasal pelanggaran HAM di dalamnya, padahal pasal-pasal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di sisi lain, memasukkan pasal-pasal pelanggaran HAM ke dalam KUHP akan menyisakan berbagai masalah antara lain problem hukum acaranya dan juga perdebatan paradigma kodifikasi sebagai ciri sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh sebab itu PUSHAM UII bekerjasama dengan ELSAM Jakarta dan KOMNAS HAM RI melakukan sebuah workshop untuk mengkritisi permasalahan tersebut.

Workshop dilakukan pada 27-28 Maret 2006 dengan tema "Kejahatan Serius terhadap Hak Asasi Manusia (*Serious Crime against Humanity*) dalam Rancangan KUHP", bertempat di Hotel Santika Yogyakarta dan pesertanya adalah berbagai *stakeholder* di Yogyakarta yaitu kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, aktifis NGO dan berbagai organisasi pergerakan kemahasiswaan yang lain.

Tampil sebagai pembicara adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., L.L.M., Prof. Muladi, S.H., Prof. Emong Komariah Sapardjaya, Andi Samsan Nganro, S.H., Rudi M. Rizki, S.H., LL.M., dan Ifdhal Kasim, S.H.



b. The formulation of main regulations as a reference for many types of crime. The necessity of main regulations to resolve in the draft is still evolve over time. Therefore, what need to resolve in the draft is the to implement since commonality the nature of crime will increasingly to implement system on issues related to criminal law will be difficult a. Full codification of human rights articles in the proposed draft is still

The seminar come to the following conclusions:

The spoke-persons were Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., L.L.M., Prof. Muladi, S.H., Prof. Emong

Komariah Sapardjaya, Andi Samsan Nganro, S.H., Rudi Rizki, S.H., L.L.M., and Ifdhal Kasim, S.H.

stakeholders in Yogyakarta, i.e. law scholars, lawyers, NGO activists and other student movement activists. Draft". The workshop was held on 27-28 March 2006 in Santika Hotel Yogyakarta. Attending participants were Commission on Human Rights entitled "Serious Crime against Humanity in Criminal Law To explore and discuss this controversial issue, PUSHAM UII in collaboration with ELSAM Jakarta and National

draft various articles on human rights issue. This generated controversy because these articles have been enacted in Human Rights Tribunal Act issued in 2000. One of the sources of preparation of the new penal code draft raised public debate and controversy. After 1998, the is the preparation of new penal code which has been done for over thirty years. One of them various attempts have been made in seeking and establishing an ideal law system for Indonesia. One of them

National Commission on Human Rights, Fadillah Agus, S.H., M.H. (Tri Sakti University and ICRC), Agung Yudhawiranata, SIP, LL.M (ELSAM), and Antonio Prajasto (DEMOS). A number of international and national experts were invited to speak and present papers in the trainings

(7) Human Rights Monitoring Mechanism (8) Humanitarian Law and International Tribunal (9) Human Rights in Public Administration (4) International Human Rights Law (5) National Human Rights Law (3) Economic, Social and Cultural Rights (2) Civil and Political Rights (1) Introduction to Human Rights The two series of training throughout Indonesia. Materials presented in the trainings included:

Program Description

- and other terms in other human rights violations issues.
- d. The formulation of human rights articles are not accompanied by the improved formulation of general rule, which possibly will generate legal problems in the future such as the definition on command responsibility relating to human rights violations in international law such as Rome Statute and other laws.
- c. There is possibility of human rights articles formulated in the draft overlapping with other arrangement in unsatisfactory, hence requires more extensive study.
- ROME STATUTE**
- FOCUSED GROUP DISCUSSION ON THE URGENCY TO RATIFY**
- held on 22 June 2006 in Santika Hotel Yogyakarta and attended by 15 participants. The discussion was conducted by ELSAM Jakarta on "The Urgency to Ratify Rome Statute by the Government of Indonesia". This program was part of serial discussion to obtain scholars' perspectives about the results of a research seminar drawn from ELSAM, followed by an intensive discussion by all participants who consist of lectures of several conclusions as follow:
1. It is time for Indonesia to ratify the Rome Statute since up to this time Indonesia has not yet dealt with gross human rights violations in the past while international demand to deal with such cases is very high and this will influence the image of Indonesia before international community.
2. Practically, the efforts to ratify Rome Statute should be supported and submitted as soon as possible to the parliament since one of Human Rights National Action Plan is to ratify international covenants on human rights.
3. Substantially, there are problems with synchronization and harmonization of Rome Statute with the existing Indonesian legal system.
4. It is necessary to examine and anticipate the possibility of negative impacts should Indonesia ratifies the Statute such as the possibility of Indonesia's intelligent information being accessed by international community which certainly will threaten national security.
5. For the success of such efforts, adequate lobbying to the parliament and dissemination to all national community members are required. Universities in this respect can play an important role as pressure groups for such efforts.

Dari seminar ini telah dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- Semangat kodifikasi sepenuhnya atas berbagai hal yang berkaitan dengan hukum pidana akan sangat sulit diterapkan karena seringkali moda kejahatan akan semakin berkembang dengan berjalan waktu. Sehingga yang perlu dipertegas dalam RKUHP adalah adanya peraturan induk ("babon"-jawa) sebagai rujukan berbagai moda kejahatan yang terjadi. Sedangkan perkembangan model kejahatan baru dapat disikapi dengan menerbitkan undang-undang.
- Rumusan pasal-pasal HAM dalam RKUHP rancangan tahun 2006 masih belum sempurna, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam.
- Rumusan pasal-pasal HAM dalam RKUHP banyak yang bertentangan dengan pengaturan lain dalam undang-undang. Sehingga perlu dipertegas batas-batas pengaturannya dan bagaimana kaitannya dengan pengaturan pelanggaran HAM yang terdapat dalam Hukum Internasional seperti Statuta Roma dan lain sebagainya.
- Rumusan pasal-pasal tentang pelanggaran HAM tidak diikuti dengan perbaikan rumusan umum yang terdapat dalam buku I, sehingga akan memunculkan masalah hukum di kemudian hari jika tetap diberlakukan, seperti pengertian tanggung jawab komando dan beberapa istilah dalam pelanggaran HAM yang lain.

## FOCUSED GROUP DISCUSSION TENTANG URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaring aspirasi kalangan akademis tentang Hasil Penelitian yang dilakukan oleh ELSAM Jakarta tentang Urgensi Ratifikasi Statuta Roma oleh Pemerintah Indonesia. FGD ini diisi dengan penyampaian hasil penelitian oleh Agung Yudhawiranata dan Abdul Haris Semendawai dari ELSAM dan kemudian dilakukan diskusi intensif dengan para peserta. Sedangkan pesertanya adalah dosen pengajar Hukum HAM dan Hukum Internasional dari seluruh Fakultas Hukum di berbagai Universitas se DIY-Jateng.

FGD ini dilaksanakan pada 22 Juni 2006 di Hotel Santika Yogyakarta dan dihadiri oleh 15 orang peserta. Hasil dari FGD ini adalah :

- Indonesia sudah saatnya meratifikasi Statuta Roma, hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa hingga saat ini Indonesia masih belum bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sedangkan tuntutan internasional untuk penuntasan kasus tersebut sangat tinggi sehingga akan mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia Internasional.
- Secara praktis, usaha untuk melakukan ratifikasi Statuta Roma harus didukung dan segera didesakkan ke kalangan DPR karena saat ini adalah momentum yang tepat di mana salah satu isi RAN HAM adalah usaha untuk melakukan ratifikasi terhadap berbagai Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia.
- Secara substantif, ada masalah kaitannya dengan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
- Perlu dikaji juga kemungkinan buruk (risiko buruk) jika Indonesia melakukan ratifikasi, misalnya: data intelijen Indonesia harus bisa diakses oleh kalangan internasional dan hal itu dapat mengancam keamanan nasional Indonesia.
- Demi suksesnya usaha ini, perlu dilakukan lobi yang memadai kepada kalangan dewan dan juga disseminasi yang meluas pada masyarakat luas. Universitas menjadi basis besar dan mapan untuk dijadikan *pressure group* terhadap usaha ini.

# RANGKAIAN PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM COP (COMMUNITY ORIENTED POLICING) BAGI AKADEMI KEPOLISIAN SEMARANG



## A. Latar belakang kegiatan

**Latar Belakang Kegiatan**  
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya penguatan pemahaman HAM dan pengetahuan tentang Polmas di lingkungan pendidikan kepolisian bagi kalangan taruna Akpol. Dengan training ini, diharapkan para taruna mampu menghayati HAM secara lebih mendalam dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas-tugas nantinya. Dengan training ini pula, para taruna mampu menerapkan Polmas, sebagaimana yang menjadi perintah dan kebijakan Kapolri, dimana pun mereka bertugas nantinya.

Atas dasar tujuan inilah, PUSHAM UII dan Akpol Semarang bekerjasama menyelenggarakan Training HAM dan Polmas yang didukung oleh The Asia Foundation (TAF).

### B. Gambaran Kegiatan

1. Pendidikan atau training HAM dan Polmas diselenggarakan secara bergelombang, sebanyak 5 gelombang atau 5 minggu. Tiap gelombang dibagi menjadi 2 kelas (A dan B), dengan jumlah peserta antara 25-32 taruna, diselenggarakan pada Minggu I dan II bulan Agustus 2006, kemudian dilanjutkan pada minggu I, II dan III bulan September 2006. Kegiatan dilaksanakan pada malam hari yaitu 3 kali dalam seminggu dan diakhiri dengan program studi lapangan yaitu di kawasan Malioboro Yogyakarta.
  2. Pada setiap gelombang, sebelum dilangsungkan kegiatan training, para peserta diminta untuk mengisi pre-test untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isu-isu HAM dan Polmas. Pada akhir kegiatan, mereka mengisi post-test dan lembar evaluasi kegiatan, untuk mengevaluasi para pengajar dan metode pembelajaran.
  3. Materi HAM yang disampaikan dalam training ini adalah (1) Pengantar HAM (2) Instrumen Pokok HAM dan Peraturan HAM di Indonesia (3) Studi Kasus Pelanggaran HAM Ekosob dan Sipil Politik (4) Skema Penegakan HAM di Indonesia. Sedangkan untuk materi Polmas adalah: (1) Memahami Polmas I: Polmas berdasarkan SKEP Kapolri No. 737 tahun 2005 (2) Memahami Polmas II: Polmas diberbagai Wilayah, Pengalaman PUSHAM UII (3) Memahami Karakteristik Masyarakat: Strategi Merancang Program Polmas dan Menggalang Dukungan Masyarakat (4) Polmas: Resolusi Konflik dan Problem Solving di Masyarakat.
  4. Pengajar HAM berjumlah 5 orang, sedangkan pengajar Polmas berjumlah 4 orang perminggunya/gelombang. Setiap kelas dipandu, difasilitasi oleh 2 orang pengajar, dan didampingi oleh seorang pengajar/pengasuh taruna Akpol. Dimana setiap gelombang/minggu dibagi dalam dua kelas: A dan B. Adapun pengajar HAM yaitu: (1) M. Irsyad Thamrin, S.H. (Direktur LBH Yogyakarta); (2) Supriyanto Abdi, M.A. (PUSHAM UII), (3) Eko Riyadi, S.H. (PUSHAM UII), (4) Siti Roswati Handayani, S.H. (Rifka Annisa Women's Crisis Center); and (5) Triningtyasasih, M.A. (Rifka Annisa Women's Crisis Center). Sedangkan pengajar Polmas adalah: (1) Imran, S.H., M.H. (PUSHAM UII); (2) La Ode Arham, S.S. (PUSHAM UII), (3) Stefanus Tri Guntur Narwaya, S.Sos (Aktivis Pergerakan Sosial) dan Felix Bambang Prakoso (Aktivis Pergerakan Sosial).

oleh seorang pengajar/pengasuh taruna Akpol. Dimana setiap gelombang/minggu dibagi dalam dua kelas: A dan B. Adapun pengajar HAM yaitu: (1) M. Irsyad Thamrin, S.H. (Direktur LBH Yogyakarta); (2) Supriyanto Abdi, M.A. (PUSHAM UII), (3) Eko Riyadi, S.H. (PUSHAM UII), (4) Siti Roswati Handayani, S.H. (Rifka Annisa Women's Crisis Center); and (5) Triningtyasasih, M.A. (Rifka Annisa Women's Crisis Center). Sedangkan pengajar Polmas adalah: (1) Imran, S.H., M.H. (PUSHAM UII); (2) La Ode Arham, S.S. (PUSHAM UII), (3) Stefanus Tri Guntur Narwaya, S.Sos (Aktivis Pergerakan Sosial) dan Felix Bambang Prakoso (Aktivis Pergerakan Sosial).



(2) Supriyanto Abdi, M.A. (PUSHAM UII), (3) Eko Riyadi, S.H. (PUSHAM UII), (4) Siti Roswati Handayani, S.H. (Rifka Annisa Women's Crisis Center); and (5) Triningtyasih, M.A. (Rifka Annisa Women's Crisis Center). Sedangkan pengajar Polmas adalah: (1) Imran, S.H., M.H. (PUSHAM UII); (2) La Ode Arham, S.S. (PUSHAM UII), (3) Stefanus Tri Guntur Narwaya, S.Sos (Aktivis Pergerakan Sosial) dan Felix Bambang Prakoso (Aktivis Pergerakan Sosial).

To this end, PUSHAM UII and National Police Academy signed an agreement to conduct Human Rights and Community Policing Training with The Asia Foundation (TAF) support.

B. Program Description  
B.1. Human Rights and Community Policing Training Series which fits into weeks period pre-test untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isu-isu HAM

1. Human Rights and Community Policing Training was divided into five series within five weeks period. Each series was divided into two parallel classes (Class A and B), while 2532 students for each class. The training for Week I and II was held in August 2006, while the training for Week I, II and III was conducted in September 2006. The trainings were held in the evening three times in one week and ended by a field study to Maliboro Area in Yogyakarta.
  2. In each series, students were asked to fill a pre-test form to assess the level of their knowledge and comprehension on human rights and community policing issues. At the end of the training, they were asked to fill a post-test form and activity evaluation form to evaluate the trainers and training method.
  3. Human rights subjects in this training include (1) Human Rights Introduction (2) Main Instruments of Human Rights and Indonesia Human Rights Regulation (3) Case Study of Ecosoc and Civil Politicas Rights violations (4) Human Rights Enforcement Scheme in Indonesia. Community Policing in Indonesia (1) Understanding Community Policing I: Community Policing according SKEP Kapoldri Number 73 year 2005 (2) Understanding Community Policing II: Community Policing in many areas, PUSHAM 737 include (1) Understanding Community Policing I: Community Policing according SKEP Kapoldri Number 73 year 2005 (2) Understanding Community Policing II: Community Policing in many areas, PUSHAM 737 and experience (3) Understanding Community Policing III: Community Policing in the community.
  4. There were five Human Rights Trainers and one supervisor from the Academy. Human Rights Trainers were: (1) M. Irsyad Thamrin, S.H. (Director of Yogyakarta Legal Aid Institution) (2) Supriyanto Abdi, M.A. (PUSHAM UII), (3) Eko Riyadi, S.H. (PUSHAM UII), (4) Siti Roswati Handayani, S.H. (Rifka Annisa Women Crisis Center) and (5) Triunitiyasasih, M.A. (Rifka Annisa Women Crisis Center). COP Trainers are: (1) Imran, S.H., (2) La Ode Abraham, S.S. (PUSHAM UII), (3) Stefanus Tri Guntri Narwaya, S.S. (Social Movement Activist) and Felix Bambara Prakoso (Social Movement Activist).
  5. Human Rights and COP subjects generally use andragogy method by using students as resource persons. The subjects were conveyed using stimulating approach so each student was enthusiastic to take part in the training. Generally and sequentially, methods included interactive dialogue, discussion (questions and answers), group discussion of certain case study, plenary discussion, role play and brief speech.

5. Pengajaran HAM dan Polmas secara umum menggunakan metode andragogi dengan memanfaatkan peserta sebagai narasumber. Materi pun disampaikan melalui pendekatan yang hidup, sehingga pada setiap kelas, para siswa selalu menyikapi dengan penuh antusias. Secara umum dan bergiliran, metode yang dipakai adalah dialog interaktif dengan peserta, tanya jawab untuk memancing agar suasana kelas hidup, diskusi kelompok untuk studi kasus, diskusi pleno, bermain peran dan ceramah singkat.

#### C. Hasil-hasil kegiatan

Pelatihan ini telah menghasilkan antara lain:

1. Kegiatan ini telah diikuti oleh sebanyak 281 angkatan III taruna Akpol Semarang, yang pada Desember lalu resmi dilantik dan bertugas.
2. Hasil evaluasi para taruna menunjukkan bahwa training semacam ini membuat mereka lebih memahami HAM dan Polmas, baik secara konseptual maupun praksis. Apalagi para pengajar memberikan contoh dan problem praksis yang kerap dihadapi oleh aparat polisi seperti aksi masa dan konflik di masyarakat. Pemecahan atas masalah ini, selain diberikan oleh pengajar yang merujuk pada pengalaman pengajar dan peraturan HAM, juga dipecahkan bersama-sama melalui diskusi pleno.
3. Untuk masalah Polmas, para taruna merasa mendapatkan pelajaran yang lebih praksis: bagaimana cara melaksanakan Polmas sesuai dengan kebijakan Kapolri, berdasarkan pengalaman PUSHAM UII dan juga pengamatan langsung mereka di lapangan (Malioboro).
4. Atas keberhasilan diatas, PUSHAM UII dan Akpol akan kembali bekerjasama dalam pelatihan serupa pada tahun 2007 ini.

#### D. Waktu dan Tempat Kegiatan

Semua rangkaian kegiatan di atas, dilaksanakan pada Agustus dan September 2006, di Semarang dan Yogyakarta

All training activities were carried out in August and September 2006 in Semarang and Yogyakarta.

#### D. Time and Venue

- 2007.
4. On such successfulness, PUSHAM UII and Akpol will again collaborate to conduct similar training in implementation community policing according to Chief of National Police Policy based on PUSHAM UII experience and their direct observation on the field (Malioboro).
  3. For community policing subject, students felt that they obtained more practical lessons: how to present practical examples and problems which encountered by police, such as mass action conflicts in the community. The solution for these problems, besides referring to the trainers more about human rights regulation, were also solved together through plenary discussion.
  2. From the students' evaluation forms, it was found out that such training enabled them to understand officially inaugurated and started their duties.
  1. The training was attended by 281 Police Academy students of third class, who in December 2006 were more about community policing, both conceptually and practically. Moreover, trainers presented practical examples and problems which often encountered by police, such as mass action conflicts in the community. The solution for these problems, besides referring to the trainers more about human rights regulation, were also solved together through plenary discussion.

#### C. Results

## LAUNCHING PROGRAM COP PAPUA

Peresmian program COP di 24 kampung, yang berasal dari Bintuni dan Fak-Fak dilakukan bersamaan dengan peresmian berdirinya Polres Teluk Bintuni yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Manokwari.



Jumlah Pokja (Kelompok Kerja) yang diikutkan pada saat peresmian pokja dan program sebanyak 130 orang. Pelantikan pokja dan peresmian program ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang dilakukan oleh tim PUSHAM UII di 24 kampung tersebut. Ada 3 tim yang diturunkan untuk melakukan penjajakan, pembentukan, pelatihan serta perumusan program dikampung-kampung tersebut. Peresmian program dan pelantikan Pokja ini dilakukan pada tanggal 28 Februari 2006 dan pada tanggal 1-2 Maret 2006 dilakukan juga pelatihan tentang hukum dan keorganisasian.

Setelah proses awal sosialisasi selesai dilakukan, PUSHAM UII, bersama-sama dengan BP Tangguh dan Polsek serta Polres Bintuni merumuskan model peresmian program dan pelantikan Pokja. Acara ini dipusatkan di Polres Bintuni dengan mengundang Kepala Kepolisian Daerah Papua. Semua Pokja diundang untuk mengikuti acara tersebut, termasuk kepala kampung di 24 kampung itu serta kapala suku masing-masing wilayah.

Sehari sebelum acara dilaksanakan tim PUSHAM UII membagikan beberapa kelengkapan Pokja yaitu; topi, kaos, rompi serta buku bacaan. Semua kelengkapan ini digunakan pada saat peresmian program dan pelantikan Pokja oleh Kapolda Papua. Dalam sambutannya Kapolda memberikan apresiasi yang tinggi terhadap munculnya program COP di masing-masing Polsek Babo, Polsek Aranday serta Polsek Kokas. Dan diharapkan dari program ini akan muncul kerjasama yang erat antara masyarakat, kepolisian dan perusahaan. Karena itu maka Pokja harus selalu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Hal ini penting agar Pokja dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertindak sesuka hati yang justru akan menimbulkan dampak yang negatif.

Setelah peresmian program dan pelantikan Pokja pada 2 hari berikutnya, tim PUSHAM UII melakukan pendalaman materi tentang hukum, tugas-tugas pokja serta keorganisasian. Semua pokja hadir pada saat acara berlangsung dan terjadi dialog interaktif diantara narasumber dan pokja tentang tugas-tugas yang harus mereka lakukan serta bagaimana aturan-aturan hukum tentang mencuri, membunuh, penganiayaan, ketertiban umum dan lain-lain harus dikuasai oleh Pokja agar masyarakat yang dapat meminta bantuan ketika terjadi kasus di masyarakat tersebut.

Disamping materi diatas, materi keorganisasian juga diberikan agar organisasi Pokja ini dapat berjalan secara baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Metode untuk mengundang masyarakat, merumuskan agenda rapat, perumusan program serta bagaimana agar organisasi ini nantinya mandiri untuk mendapat dana dan dukungan dari pemerintah daerah diberikan oleh tim PUSHAM UII. Materi ini diberikan kepada Pokja dengan harapan Pokja dapat bekerja dengan mandiri dan mampu menunjukkan manfaatnya bagi masyarakat.

Apart from the above materials, materials of organization were also delivered so the COP taskforces can work properly and can be trusted by community. Methods of inviting and mobilizing community, formulating programs and establishing independence all were given by Pusham UII's team. These materials were given with the hope that COP taskforces can work independently and can show their benefits for the community.

COP taskforces so community can ask help when a case occur. Two days after the launching of the program and inauguration of COP taskforces, Pusham UII conducted a training on law, duties of COP taskforces and organizational skills. All COP taskforces were present and there was an interactive dialogue between resource persons and COP taskforces members on duties they have to carry on as well as how regulations of theft, murder, torture, public order etc. should be mastered by members

not act as they please which will create a negative impact. A day before the realization of the program, PUSHAM UII's teams disseminated COP taskforces equipments such as hats, t-shirts and books. All equipments were used at the time of program launching and inauguration of COP taskforces. In his briefs, Kapolda gave a huge appreciation to the COP program in Polsek Babo, Polsek Aranday and Polsek Kokas. It was hoped that the program could create a strong cooperation between community, police and corporatons. It was why COP taskforces always have to coordinate with local police in solving community's problems. This was important for COP taskforces to be welcomed by community and do not act as they please which will create a negative impact.

After the first process of socialization, Pusham UII, together with BP Tangguh and Polsek as well as Polres Bintuni established the model of institutionnalization of the program and COP taskforces. The program was concentrated in Polres Bintuni inviting the chief of regional police (Kapolida) of Papua. All COP taskforces were invited to attend the program, including all chiefs of 24 villages and tribal leaders in each region.

The launching of the program was held in Teluk Bintuni which is part of Manokwari District. The number of taskforce members participating in the launching of the program was 130 persons. The launching of the program was a follow-up of socialization that Pusham UII conducted in those 24 villages. Three teams were formed to conduct a feasibility study and formulate the programs for those villages. The launching of the program was conducted on February 28 2006. On March 1-2 2007 a training of law and organization was also conducted.



The COP program in 24 villages of Bintuni and Fak-Fak was launched at the same time with the inauguration of Polres Teluk Bintuni which is part of Manokwari District. The number of taskforce members participating in the launching of the program was 130 persons. The launching of the program was a follow-up of socialization that Pusham UII conducted in those 24 villages. Three teams were formed to conduct a feasibility study and formulate the programs for those villages. The launching of the program was conducted on February 28 2006. On March 1-2 2007 a training of law and organization was also conducted.

**LAUNCHING OF COP PROGRAM IN PAPUA**

## FACILITATION OF COP TASKFORCES



The program was a follow-up of the launching of the program held in March 2006. The program was conducted in August 2006-January 2007 by sending five teams to three areas: Babo District, Aranday District and Kokas District. Each team consists of two members and was assigned to solve problems quickly and to accommodate aspirations from community about activities that would be carried out by the COP taskforces. The activity was aimed at equipping each taskforce with various skills: legal understanding, organization capability, conflict mediation, organizational negotiation and field study. In each village activity lasted for five days of presentation, discussion and problem solving.

The first day of the program was devoted to overview programs of village-level taskforce highlighting their achievement and responses of community to the performance of the taskforce. All appointed COP taskforces in Babo, Aranday and Kokas claimed that all have done socialization, set up complain center and helped solve cases. Taskforce in Tanah Merah Batu, for instance, stated that almost all problems faced by community was handled and resolved by members of the taskforce. This shows that taskforce worked independently and manageable to attract considerable support from the community.

The subsequent days were allocated for public presentation and discussion between Pusham UII team and COP taskforces. Some COP taskforces raised questions about how to deal with cases in the community such as adultery, drunk, torture, murder, the destruction of public facility and so on. It was answered that all these were criminal offenses that should be resolved by the police. What COP taskforces can do is reporting these incidents to the police for further process. Pusham UII team also reminded that problems in the community were not only criminal in nature, but also social such as placement in the workplace and the coming of immigrants into the regions. COP taskforces can serve as mediator between community leaders,

taskforces.

village administration and meeting with community to identify their responses to the activities of COP

## PENDAMPINGAN POKJA COP

Program ini merupakan tindak lanjut dari program pelantikan dan peresmian program yang telah dilakukan pada bulan Maret 2006. Program pendampingan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2006 - Januari 2007 dengan mengirimkan 5 tim untuk 3 wilayah yaitu; Distrik Babo, Distrik Aranday dan Distrik Kokas. Masing-masing tim terdiri dari 2 orang serta bagaimana memecahkan persoalan secara cepat serta untuk mengantisipasi aspirasi yang berkembang di masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja selama ini.

Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada masing-masing Pokja yaitu; hukum, membangun organisasi, konflik, mediasi, negosiasi keorganisasian serta studi lapangan. Untuk setiap kampung kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, yang diisi dengan ceramah, diskusi serta memecahkan kasus.



Pada hari pertama kegiatan diisi dengan paparan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pokja kampung, tentang capain-capaiannya program serta tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pokja. Dari semua daerah yang dilatih baik di Distrik Babo, Aranday dan Kokas semuanya menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi, membuat pos pengaduan serta membantu memecahkan kasus. Misalnya yang dilakukan Pokja Tanah Merah Baru, yang menyatakan bahwa hampir semua persoalan yang berkaitan dengan masyarakat kampung ditangani oleh Pokja dan diselesaikan oleh anggota Pokja COP. Ini menunjukkan bahwa Pokja begitu mandiri dan mampu menarik dukungan yang begitu besar dari masyarakat.

Pada hari kedua hingga hari kempat lebih banyak diisi dengan ceramah dan diskusi diantara tim PUSHAM UII dengan Pokja. Beberapa pokja mengajukan pertanyaan tentang kasus-kasus yang ada di masyarakat seperti; perselingkuhan, miras (minuman keras), penganiayaan, pembunuhan, merusak fasilitas umum dan lain-lain. Ini semua merupakan bentuk Tindak Pidana, yang harusnya diselesaikan oleh kalangan kepolisian. Apa yang dapat dilakukan oleh Pokja, menurut narasumber adalah melapor ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Tim PUSHAM UII juga memberikan pamanahan bawah persoalan yang ada di masyarakat tidak semata-mata yang bersifat kriminalitas, tetapi juga yang bersifat sosial, seperti penerimaan tenaga kerja dan masuknya para pendatang di daerah tersebut. Pokja dapat menjadi mediator yang mempertemukan tokoh masyarakat, pemerintah dan kalangan kepolisian agar daerah tersebut dapat aman dan masyarakat juga dapat bekerja dengan baik.

Pada hari terakhir pendampingan diisi dengan studi lapangan yaitu; melihat lokasi-lokasi pembuatan pos keamanan terpadu, penataan kampung, serta bertemu dengan masyarakat untuk melihat respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pokja.

## WORKSHOP PENYUSUNAN PROMOSI HAM

Program ini dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2006 di Hotel Arumbay, Biak, Papua. Program ini merupakan kerjasama antara 3 lembaga yaitu; PUSHAM UII, Pusham-Uncen Papua serta BP Tangguh. Program ini merupakan hasil dari pertemuan 3 lembaga ini di Yogyakarta, pada bulan Agustus-September 2005.

Workshop ini diawali dengan seminar sehari untuk melihat peta persoalan yang ada di Papua pada umumnya dan Teluk Bintuni secara khusus. Beberapa pembicara diundang untuk memberikan masukan kepada peserta, diantaranya adalah MRP (Majelis Rakyat Papua), Akademisi Uncen, PUSHAM UII serta tokoh adat setempat. Peserta yang diundang terdiri dari kepolisian, tokoh masyarakat dan agama, LSM serta lembaga-lembaga adat. Dari semua narasumber yang dihadirkan, terekam betapa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak mereka dan masih minimnya kemampuan untuk melakukan advokasi terhadap hak-hak itu.

Hari kedua lebih banyak diisi dengan bagaimana merumuskan program yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing, program HAM apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, metode promosi HAM dan indikator keberhasilan program.

Dari paparan beberapa narasumber pada hari kedua itu ada 2 hal yang menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dipecahkan sebelum program itu berjalan yaitu; tingkat pendidikan masyarakat yang berpengaruh pada kemampuan memahami HAM dan problem-problem lainnya serta luasnya wilayah antar satu daerah dengan daerah lain yang dipisahkan oleh sungai. Kedua hal itu akan sangat berpengaruh terhadap metode promosi HAM yang akan dilakukan oleh 3 lembaga ini.

Hal lain adalah indikator kesuksesan program ini adalah dengan banyaknya partisipasi yang aktif dari masyarakat pemerintah daerah serta semua tokoh-tokoh masyarakat daerah dalam mendukung setiap program yang dijalankan.

Kegiatan ini ditutup dengan rekomendasi perlunya seminar lanjutan di Kabupaten Teluk Bintuni, yang menghadirkan peserta-peserta yang hadir saat kegiatan di Biak

The activity was closed by a recommendation of a need for a follow-up seminar in Teluk Bintuni District that will be attended by participants who were present in Biak activity.

From explanation of some speakers in the second day, it was revealed that two problems must be dealt with before any programs can be run. They are: first, the education level of community which influences their ability to understand human rights and second, the demographic contrast of the region in which one part is separated from the other by rivers. These two conditions will definitely have some impacts on the methods of human rights promotion conducted by the three institutions. With regard to the evaluation of program success the workshop concluded by the three institutions will have some impact on the main indicators of human rights promotion among the local government as well as all local community leaders in support of the programs were among the main indicators.

The second day of workshop was devoted to establishing programs which are suitable with the local characteristics including what human rights programs that are most needed by local community, methods of their promotion as well as indicators of their success.

The workshop was started with a one day seminar to identify problems in Papua in general and Teluk Bintuni in particular. Some speakers were invited to give briefings to the participants, among them were Majelis Rakyat Papua (Council of Papua Peoples), academician from University of Cenderawasih, Pusham UII and local religious institutions. Participants invited to the workshop consisted of police, religious and community leaders, NGOs and leaders. From presentation of all speakers it was clear that community understanding of their rights was still limited and their ability to advocate these rights was also still minimal.

This program was carried out on 21-22 April 2006 in Hotel Arumbay, Biak, Papua. The program was a cooperation between three institutions: Pusham UII, Pusham Uncen and BP Tangguh. The program was a product of the meeting of the three institutions held in Yogyakarta in August-September 2005.

## WORKSHOP OF HUMAN RIGHTS PROMOTION



2. Latar belakang sosial, politik dan agamis korban  
Para korban umumnya adalah eks aktivis DI/TII (gerakan Islam radikal) di Sumatra, eks partai PSII dan DI/TII di Jawa Barat, aktivis dakwah (di DIY-Jateng) serta tokoh Muhammadiyah dan NU (di Jawa Timur). Dengan berbagai latar belakang itu, mereka juga pada umumnya adalah orang-orang yang tidak menyetujui berbagai kebijakan Orde Baru seperti Fusi Partai, militerisasi sipil, pemenangan Golkar, kebijakan KB, kebijakan pendidikan dan sebagainya. Ada juga di antara mereka adalah orang-orang awam yang tidak tahu menahu mengenai Komando Jihad, namun ditangkap dengan tuduhan terlibat Komando Jihad. Jumlah korban tersebar di berbagai wilayah dengan angka yang variatif: Jawa Barat dan DKI 200 orang, Jawa Timur 113 orang, DIY-Jawa Tengah 50 orang dan Sumatra kurang lebih 1000 orang.
  3. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan kekerasan yang dialami oleh para korban  
Para korban mengalami tekanan, intimidasi, penangkapan tanpa surat keterangan, tuduhan melakukan makar, penyiksaan dengan pentungan, diinjak dengan kursi, disetrum listrik, kepala yang dibenturkan ke tembok, dipaksa menggigit penggaris, dan masih banyak lagi. Sebagian dari mereka diseret ke pengadilan melalui persidangan yang tidak fair (*unfair trial*).

#### **D. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan Februari - Desember 2006, di beberapa kota, yaitu Yogyakarta, Lamongan, Ponorogo, Sukabumi, Surakarta, Brebes dan Jakarta.

## **SURVEI ISLAM DAN ISU-ISU GLOBAL DI KALANGAN PESANTREN DAN GERAKAN ISLAM**

Survei ini dilakukan dengan maksud untuk menggali dan mengidentifikasi beragam pandangan di kalangan masyarakat pesantren dan gerakan Islam khususnya yang ada di Yogyakarta dan Solo. Ada lima isu utama yang menjadi fokus survei ini, yakni (1) isu HAM, (2) isu demokrasi dan sekulerisme, (3) isu perempuan dan jender, (4) isu liberalisasi dan globalisasi ekonomi serta (5) isu konspirasi global dan anti-Amerikanisme. Diharapkan hasil dari survei ini bisa menyuguhkan beragam sikap dan pandangan yang sesungguhnya dikemukakan sejumlah pesantren dan gerakan Islam yang menjadi sasaran survei ini serta bisa menepis asumsi-asumsi dan anggapan-anggapan yang sangat esensialis dan sarat dengan generalisasi selama ini seputar hubungan Islam dengan isu-isu global tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan sejak awal Desember 2006, hingga akhir Februari 2007, dengan total responden sebanyak 100 yang berasal dari 12 sasaran: PP Al Mukmin, PP Ibnu Qayyim, PP Al Falahiyah, Pesantren Ar Rahmah, PP Taruna Al Qur'an, PP Nurul Ummahat dan Pesantren Al Madinah. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Jemaah Salafy Masjid Pogung Raya. Kesemua responden berdomisili di Yogyakarta, kecuali Pesantren Al Mukmin di Sukoharjo, Solo.

This activity was started in early December 2006 and ended in February 2007. Total respondents involved were 100 respondents from twelve targeted groups, i.e. PP Al Mukmin, PP Ibnu Qayyim, PP Al Falahiyah Pesantren Ar Rahmah, PP Taruna Al Qur'an, PP Nurul Umahat and Pesantren Al Madinah. Besides those pesantrens, there are Justice and Prosperous Party/Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Council of Indonesia Mujahidin/Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Universiti-based dakwah movements (Lembaga Dakwah Al Ihsan/LDI) in Gajah Mada University Yogyakarta, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Salafy community Pogung Raya Mosquue. All respondents are domiciled in Yogyakarta, except Pesantren Al Mukmin which located in Sukoharjo Solo Central Java.

## SURVEY ON ISLAM AND GLOBAL ISSUES IN PESANTRENS AND ISLAMIC MOVEMENTS

The research was conducted in FebruaryDecember 2006 in several cities: Yogyakarta, Lamongan, Ponorogo, Sukabumi, Surakarta, Brebes, and Jakarta.

#### **D. Period and Location**

3. Types of human rights violation and violence
3. Victims mostly experienced physical and psychological pressures, intimidation, and torture. This ranges from detention without warrant, allegation of coup, unfair trial to various forms of degrading and inhuman treatments.

Generally, General Affairs activities include maintenance of office inventories and adding up book collection for library and adding other necessary inventories. To support the Center's activities, PUSHAM UII have bought an office with eight rooms, guest room, meeting room, library room, and kitchen with supporting units and other households equipment such as furniture and Air Conditioners.

In addition, PUSHAM UII's library has a sufficient number of book collection specifically arranged by a librarian. So far PUSHAM UII has books of 1000 titles in 1200 exemplars.

PUSHAM UII has also published a number of campaign means such as bulletin, newsletters, comics, t-shirts and books. Some of books published by PUSHAM UII are as follows:

1. Polisi & Perubahan Sosial. Seri Modul oleh: Eko Prasetyo dkk
2. Polisi & Perubahan Sosial. Seri Buku Teks oleh: Eko Prasetyo dkk
3. Hand Book Lembaaga Ombudsman Daerah oleh: Tim PUSHAM UII
4. Hand Book Arti Penting Lembaaga Ombudsman Daerah oleh: Tim PUSHAM UII
5. Lembaaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintahan yang Baik oleh : Siti Roswati Handayani, S.H., Imran, S.H., dan Eko Riyadi, S.H.

## GENERAL AFFAIRS PROGRAM

### PROGRAM BAGIAN UMUM

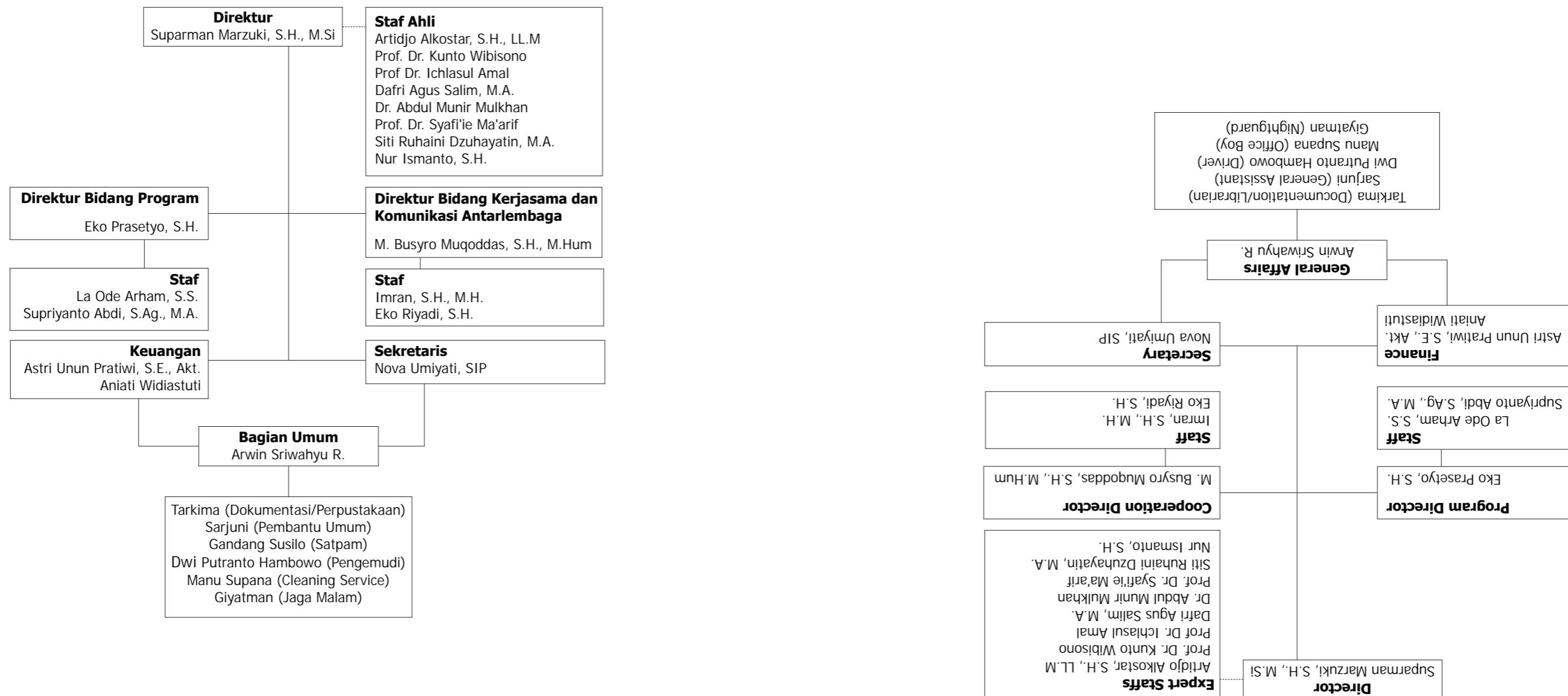
Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan bagian umum ini lebih banyak diisi dengan perawatan barang-barang inventaris kantor dan penambahan koleksi buku serta inventaris lain. Untuk menunjang berbagai aktifitas kelembagaan, PUSHAM UII membeli satu buah gedung dengan 8 kamar ditambah dengan ruang tamu, ruang rapat, ruang perpustakaan, serta dapur dengan seluruh perlengkapan pendukung seperti 9 unit komputer lengkap, 2 unit *lap top*, 2 *Overhead Projector* (OHP), 2 buah layar *Overhead Projector* (OHP), 2 buah *LCD Projector*, 1 buah *Video Cassette Player*, 1 buah televisi 21", 2 buah kamera foto, 1 buah kamera video, 1 buah *handycam*, 2 buah *scanner*, 6 buah *tape recorder*, 1 buah *Microphone* dan *wireless*, 1 buah mesin fax, 11 buah telepon serta perlengkapan rumah seperti mebel dan *Air Conditioner*.

Selain itu, PUSHAM UII telah mempunyai koleksi buku yang relatif memadai yang dikelola secara khusus oleh seorang pustakawan. Buku tersebut terdiri dari 1000 judul dengan jumlah 1200 eksemplar.

Selain dari beberapa program di atas, PUSHAM UII telah menerbitkan beberapa alat kampanye antara lain buletin, *newsletter*, komik, kaos dan buku. Khusus untuk buku beberapa judulnya antara lain:

1. Polisi & Perubahan Sosial. Seri Modul oleh: Eko Prasetyo dkk
2. Polisi & Perubahan Sosial. Seri Buku Teks oleh: Eko Prasetyo dkk
3. Hand Book Lembaaga Ombudsman Daerah oleh: Tim PUSHAM UII
4. Hand Book Arti Penting Lembaaga Ombudsman Daerah oleh: Tim PUSHAM UII
5. Lembaaga Ombudsman daerah Yogyakarta dan Pemerintahan tang Baik oleh : Siti Roswati Handayani, S.H., Imran, S.H., dan Eko Riyadi, S.H.

## Struktur Organisasi



## Organization Structure

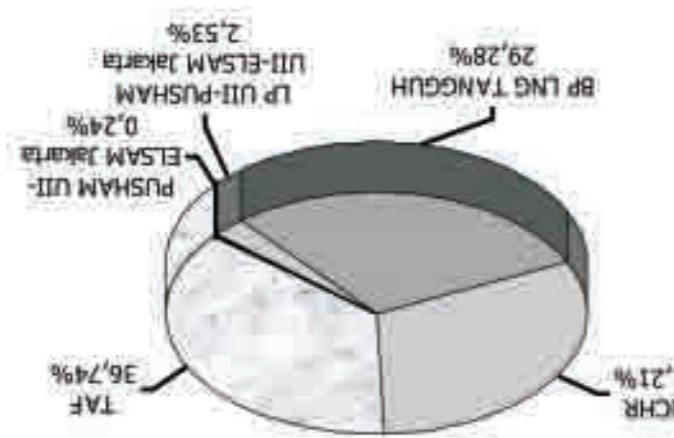
## Financial Statement

### YEAR 2006 CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA PROJECT FUND DISTRIBUTION

No.	Project Title	Donor Agent	Total Fund	Managed (Rp)	Sub Total	% age
1.	COP Program Launching and COP Taskforce in Bintuni	BP LNG TANGGUH	343.590.000	924.655.000	29,28%	
2.	Human Rights Law Training for Lecturers (2 series)	NCHR	641.392.000	985.842.000	31,21%	
3.	Developing and establishing COP Curriculum for Semarang Police Academy Students	TAF	1.160.340.000	1.160.340.000	36,74%	
4.	FGD on Rome Statute Ratification	PUSHAM UII-ELSAM Jakarta	7.500.000	7.500.000	0,24%	
5.	Research on jihad Command	LP UII-PUSHAM	80.000.000	80.000.000	2,53%	
	<b>Total</b>		<b>3.158.337.000</b>	<b>3.158.337.000</b>	<b>100.00%</b>	

YEAR 2006

### YEAR 2006 CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA PERCENTAGE PROJECT FUND DISTRIBUTION



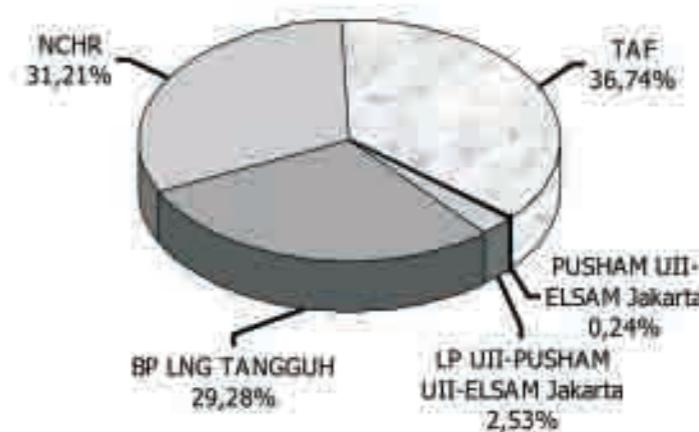
### YEAR 2006 CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA PERCENTAGE PROJECT FUND DISTRIBUTION

## Laporan Keuangan

### PENGELOLAAN DANA PROYEK PUSAT STUDI HAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2006

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	Sub Total	% ase
1.	Peresmian Program COP dan Pelatihan Pokja COP di Bintuni	BP LNG TANGGUH	343.590.000	924.655.000	29,28%
	Program Pendampingan COP di Distrik Aranday, Babo & Fak Fak, Kep. Bintuni, Papua		581.065.000		
2.	Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar (2 gelombang)	NCHR	641.392.000	985.842.000	31,21%
	Penulisan Buku Ajar HAM		344.450.000		
3.	Mengembangkan, Menyusun & Training Kurikulum COP bagi Taruna/Taruni Akpol Semarang	TAF	1.160.340.000	1.160.340.000	36,74%
4.	FGD Ratifikasi Statuta Roma	PUSHAM UII-ELSAM Jakarta	7.500.000	7.500.000	0,24%
5.	Penelitian Komando Jihad	LP UII-PUSHAM	80.000.000	80.000.000	2,53%
	<b>Total</b>		<b>3.158.337.000</b>	<b>3.158.337.000</b>	<b>100.00%</b>

### PROSENTASE PENGELOLAAN DANA PROYEK PUSAT STUDI HAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2006



**PENGELOLAAN DANA PROYEK  
PUSAT STUDI HAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
TAHUN 2006**

No.	Nama Proyek/Program	Lembaga Donor	Jumlah Dana Dikelola (Rp)	% ase	Jangka Waktu
1.	Training Hukum dan Ham untuk Dosen Pengajar (2 gelombang)	NCHR Oslo University	641.392.000	20,31%	Januari - Juni 2006
2.	Peresmian Program COP dan Pelatihan Pokja COP di Bintuni	BP LNG - TANGGUH JAKARTA	343.590.000	10,88%	Februari 2006
3.	Mengembangkan, Menyusun & Training Kurikulum COP bagi Taruna/Taruni Akpol Semarang	The Asia Foundation (TAF)	1.160.340.000	36,74%	31 Maret 2006 - 31 Maret 2007
4.	FGD Ratifikasi Statuta Roma	ELSAM Jakarta	7.500.000	0,24%	Juni 2006
5.	Penelitian Komando Jihad	Kerjasama LP UII-PUSHAM UII-ELSAM Jakarta	80.000.000	2,53%	Maret - Desember 2006
6.	Program Pendampingan COP di Distrik Aranday, Babo & Fak Fak, Kep. Bintuni, Papua	BP LNG - TANGGUH JAKARTA	581.065.000	18,40%	Agustus - Desember 2006
7.	Penulisan Buku Ajar HAM	NCHR Oslo University	344.450.000	10,90%	Oktober 2006 - Juli 2007
<b>Total</b>			<b>3.158.337.000</b>	<b>100,00%</b>	

**PROSENTASE PENGELOLAAN DANA PROYEK  
PUSAT STUDI HAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
TAHUN 2006**



**YEAR 2006**  
**CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA**  
**PERCENTAGE PROJECT FUND MANAGEMENT**

No.	Project Title	Donor Agent	Total Fund Managed (Rp)	% ase	Period	Total
1.	Human Rights Training for Lecture (2 series)	NCHR Oslo University	641.392.000	20,31%	January - June 2006	3.158.337.000 100,00%
2.	Official Appointment of COP Program and Bintuni	BP LNG - TANGGUH JAKARTA	343.590.000	10,88%	February 2006	
3.	Developing, Establishing and Training Students in Curriculum for Police Academy	The Asia Foundation (TAF)	1.160.340.000	36,74%	March 2006 - 31 March 2007	
4.	Focused Group Discussion on Rome Statute	ELSAM Jakarta	7.500.000	0,24%	June 2006	
5.	Research on jihad Command	Kerjasama LP UII-PUSHAM UII-ELSAM Jakarta	80.000.000	2,53%	March - December 2006	
6.	COP Facilitation Program in Districts of Aranday, Babo & Fak Fak, Kep. Bintuni, Papua	BP LNG - TANGGUH JAKARTA	581.065.000	18,40%	August - December 2006	
7.	Development of Human Rights Textbook	NCHR Oslo University	344.450.000	10,90%	October 2006 - July 2007	

**YEAR 2006**  
**CENTER FOR HUMAN RIGHTS STUDIES ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA**  
**PROJECT FUND MANAGEMENT**

